



## MEDIASI

### Regulator wajibkan asuransi

JAKARTA: Biro Perasuransian Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Baepam-LK) akan mengkaji penerapan skema asuransi wajib dalam perumusan asuransi bencana di Indonesia. Kepala Biro Perasuransian Baepam-LK Isa Rachmatranta mengatakan skema asuransi wajib tersebut sangat mungkin diterapkan di Tanah Air, terkait dengan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan. Selain itu, pembangunan yang belum merata juga dinilai menyebabkan banyak daerah terpencil belum terlindungi layanan asuransi. (BISNIS/04)

### Asbanda minta kelonggaran

JAKARTA: Asbanda berniat meminta kelonggaran kepada Bank Indonesia terkait dengan rencana penetapan rasio pinjaman terhadap simpanan (*loan to deposit ratio/LDR*) yang dikaitkan dengan giro wajib minimum (GWM) per Maret 2011. "Kami akan meminta kelonggaran kepada BI, kalau sampai akhir Maret 2011 belum memenuhi ketentuan LDR," kata Ketua Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) Winny Erwindia, pekan lalu. Hingga saat ini, masih banyak BPD di Indonesia yang memiliki LDR pada kisaran 50%. Dia menargetkan rata-rata tingkat LDR BPD per akhir tahun sebesar 60%-70%, sehingga dapat mengejar batas bawah ketetapan LDR oleh BI 78% pada Maret 2011. (BISNIS/02)

### Migrasi kartu ATM 4 tahun

JAKARTA: Bank Indonesia memperkirakan keseluruhan proses migrasi penggunaan kartu berbasis teknologi magnet (*magnetic stripe*) menjadi kartu *chip* membutuhkan waktu sekitar 4 tahun. Aribowo, Kepala Biro Kebijakan dan Pengembangan Sistem Pembayaran Bank Indonesia (BI), mengatakan saat ini terdapat sekitar 50 juta kartu berbasis teknologi magnet yang harus dialihkan ke kartu *chip*. Berdasarkan data BI, jumlah kartu anjungan tunai mandiri (ATM) per 30 September 2010 mencapai 50,7 juta kartu. (BISNIS/02)

# Kontribusi dapen minim

## Harmonisasi dana pensiun dinilai mendesak

OLEH M. TAHIR SALEH  
Bisnis Indonesia

**JAKARTA: Asosiasi Dana Pensiun Lembaga Keuangan (ADPLK) kembali mendesak harmonisasi peraturan dana pensiun yang dinilai tumpang-tindih, sehingga mengakibatkan kontribusi dana pensiun baru sekitar 2% dari total produk domestik bruto (PDB).**

Ketua Bidang Hubungan Masyarakat ADPLK Ricky Samsico mengatakan selama ini pihaknya gencar melakukan sosialisasi terhadap masyarakat mengenai pentingnya dana pensiun. Meski demikian, peraturan dana pensiun yang masih bersifat sukarela bagi perusahaan menjadi kendala tersendiri bagi pertumbuhan industri.

"Kami berharap pemerintah secepatnya melakukan harmonisasi peraturan dapen, sehingga pertumbuhan industri itu bisa lebih tinggi lagi. Dapen belum wajib bagi perusahaan, jadi sulit tumbuh," katanya di Jakarta akhir pekan lalu.

Industri dana pensiun diatur melalui UU No.11/1992 tentang Dana Pensiun. Namun, ketentuan dalam regulasi tersebut menyebutkan dana pensiun masih sukarela bagi perusahaan. Di sisi lain, dalam UU No. 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional tercantum juga kewajiban perusahaan dalam menyelenggarakan dana pensiun.

Pada pertengahan tahun lalu, pemerintah berjanji menyelesaikan harmonisasi undang-undang jaminan sosial pada tahun ini. Namun, hingga kini belum terealisasi.

Saat dikonfirmasi *Bisnis* pada akhir pekan lalu, Kepala Biro Dana Pensiun Baepam-LK Mulabasa Hutabarat belum memberikan

**Beberapa agenda harmonisasi regulasi jaminan sosial**

- RUU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
- PP tentang Jaminan Pensiun
- Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan yang terkait dengan implementasi SJSN a.l. -UU No.11/1992 tentang Dana Pensiun, UU No.13/2003 tentang Ketenagakerjaan
- Amandemen UU No.11/1992 tentang Dana Pensiun

Keterangan: SJSN = Sistem Jaminan Sosial Nasional  
Sumber: www.sjsn.menkesra.go.id, diolah  
BISNIS/ILHAM NESABANA

tanggapan.

Sebelumnya, Mulabasa menegaskan pihaknya mendukung sepenuhnya harmonisasi regulasi jaminan sosial yakni UU Dapen, UU No. 3/1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, dan UU No.40/2004 SJSN.

Pemerintah juga memiliki kewajiban membuat peraturan perundang-undangan yang terkait dengan implementasi SJSN a.l. PP tentang Jaminan Pensiun.

Ketua Bidang Investasi ADPLK Nur Hasan Kurniawan menam-

bahkan apabila harmonisasi perangkat undang-undang terealisasi, aset dana pensiun bisa tumbuh lebih dari pertumbuhan rata-rata industri 20%-25% per tahun.

"Kalau dana pensiun itu wajib, pertumbuhan industri dapen akan maksimal dan bisa berkontribusi lebih besar terhadap PDB. Langkah tersebut membutuhkan penyesuaian regulasi," kata Nur.

Aset DPLK saat ini menembus Rp17 triliun pada September tahun ini, atau naik sekitar 20% dibandingkan dengan periode yang

sama tahun lalu sekitar Rp13,6 triliun seiring dengan dorongan hasil investasi sepanjang tahun ini.

Adapun, ADPLK saat ini terdiri dari 23 anggota, yaitu lima anggota dari sektor perbankan dan 18 dari asuransi jiwa yang merupakan perusahaan penyelenggara DPLK di Indonesia.

### Wilayah jangkauan

Selanjutnya, Ricky mengatakan Jakarta dan Jawa mendominasi jumlah peserta maupun jumlah dana pensiun mengingat di wilayah luar Jawa kesadaran memiliki pensiun belum tinggi.

Pemerintah belum memasukkan persentase wilayah jangkauan dana pensiun dalam laporan kinerja 2008 dan 2009.

Namun, data Biro Dana Pensiun Baepam-LK pada 2001 menyebutkan Jakarta mendominasi 67,5% sebaran geografis dana pensiun, khususnya DPPK, sedangkan 10,8% oleh Banten dan Jawa Barat. (tahir.saleh@bisnis.co.id)

# Panin siapkan Rp400 miliar untuk ekspansi

OLEH HENDRI T. ASWORO  
Bisnis Indonesia

JAKARTA: PT Bank Pan Indonesia (Panin) Tbk menyiapkan dana sekitar Rp300 miliar hingga Rp400 miliar guna menambah 130 kantor cabang baru.

Dana itu juga dialokasikan untuk membuka gerai pembiayaan sektor mikro yang saat ini diincar oleh bank papan atas lainnya.

Direktur Retai Banking Bank Panin Ken Ng mengatakan saat ini kantor cabang perseroan men-

capai 420 unit dan akan ditingkatkan menjadi 550 kantor cabang pada tahun depan guna mendorong pertumbuhan secara organik.

"Investasi 130 kantor cabang kira-kira sekitar Rp300 miliar hingga Rp400 miliar. Hal itu untuk memperkuat jaringan saja. Kami ingin memfokuskan ekspansi secara organik untuk mencapai lingkaran aset lima besar," ujarnya kepada *Bisnis*, pekan lalu.

Menurut dia, pihaknya belum berencana untuk berkembang

melalui akuisisi bank atau perusahaan nonbank. "Setahu saya belum ada rencana akuisisi. Keputusan itu ada pada pemegang saham," ujar Ken.

Waditir Bank Panin Roosniati Salihin sebelumnya mengutarakan ekspansi telah dilakukan manajemen dengan melakukan konversi bank umum syariah beberapa waktu lalu. "Kami akan berkonsentrasi kepada pertumbuhan organik," kata Roosniati.

Ken mengutarakan pertumbuhan secara organik akan di-

arahkan untuk mendorong ekspansi pembiayaan usaha mikro, karena segmen tersebut sedang diincar bank-bank papan atas lainnya dan bank asing terkait dengan margin tinggi.

Menurut dia, saat ini perseroan masih membuka gerai layanan pembiayaan mikro pada 12 kantor cabang di Surabaya. Respons yang cukup positif terhadap gerai itu mendorong manajemen bank milik konglomerat Mukmin Ali Gunawan itu berniat melakukan ekspansi di wilayah lain.

"Kami berencana meningkatkan jumlah gerai, karena kami melihat sebenarnya potensi sektor mikro besar. Kami siap ekspansi di tempat lain. Kami berencana membuka gerai di Sulawesi, Bali, Jateng, dan Sumatra, khususnya Riau," tuturnya.

Dia memaparkan manajemen berniat meningkatkan kontribusi sektor tersebut sebesar 5% dari saat ini 2% dari total kredit. Meski baru 2 tahun menggeluti pembiayaan mikro, portofolio segmen itu mencapai Rp500 miliar.

# Bank RI siap garap pasar tunggal Asean

OLEH YUSRAN YUNUS  
Bisnis Indonesia

NUSA DUA, Bali: Perbankan Tanah Air siap beradu kekuatan dengan perbankan negara Asean lainnya untuk memperebutkan kue pertumbuhan ekonomi pasar tunggal Asean dalam kurun waktu 5 tahun-10 tahun ke depan.

Langkah tersebut terkait dengan konsolidasi dalam penggabungan kekuatan ekonomi 10 negara Asean, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Myanmar, Laos, Kamboja dan Vietnam menjadi pasar tunggal Asean.

Selain itu, jumlah penduduk 10 negara tersebut yang mencapai 600 juta jiwa dinilai dapat menjadi kekuatan penyeimbang dua raksasa besar Asia, yaitu China dan India.

Kue ekonomi Asean per 31 Desember 2009, yaitu pendapatan per kapita negara Asean mencapai US\$1.492 miliar, nilai perdagangan US\$1.536 miliar, investasi langsung asing US\$60 miliar dan jumlah pekerja sebanyak 276 juta.

Ketua umum Perhimpunan Bank-bank umum Nasional (Perbanas) Si-

git Pramono mengatakan pasar tunggal Asean pada 2015 yang merupakan kesepakatan 10 kepala negara di Asia Tenggara itu merupakan tantangan menarik bagi perbankan nasional.

"Mau tidak mau, perbankan Indonesia harus segera menyiapkan diri sejak saat ini untuk menyongsong integrasi ekonomi pada 2015 dan integrasi finansial pada 2020," ujarnya sesuai acara penutupan Konferensi Bankir Asean ke-18 di Nusa Dua, Bali, akhir pekan lalu.

Penerapan masyarakat ekonomi dan pasar tunggal Asean menjadi tema utama *Asean Banking Conference* ke-18 dan *Asean Banking Council Meeting* ke-40 yang berlangsung 10-12 November 2010.

Dia mengemukakan postur perbankan Tanah Air saat ini relatif bagus terkait dengan perbaikan beberapa indikator perbankan, seperti total aset Rp2.300 triliun, total kredit Rp1.600 triliun, *loan deposit ratio* (LDR) 70%, rasio kredit macet (*non performing loan/NPL*) di bawah 5%, dana pihak ketiga (DPK) melebihi Rp1.600 triliun.

"Meski demikian, kinerja per-

bankan Tanah Air masih di bawah kekuatan Singapura dan Malaysia yang memiliki kinerja perbankan lebih berkilau. Kedua negara itu memiliki beberapa bank berkelas internasional dengan total aset di atas bank-bank kelas internasional Indonesia," ujarnya.

Sigit mengingatkan sektor perbankan di Tanah Air memiliki waktu 5 tahun hingga 10 tahun ke depan guna menyiapkan diri dalam penguatan struktur permodalan, perluasan jaringan, penguasaan teknologi informasi, penguatan sumber daya manusia, konsolidasi aturan, dan kebijakan perbankan.

"Setelah konferensi ini, kami akan segera berdialog lebih intensif dengan Bank Indonesia dan pemangku kepentingan di dalam negeri lainnya untuk bersama-sama menyusun langkah-langkah strategis menghadapi pasar tunggal Asean 2015 dan integrasi finansial 2020," ujar Sigit.

Deputi Gubernur Bank Indonesia Halim Alamsyah mengatakan integrasi pasar akan memicu pengembangan sektor perbankan di kawasan Asean, khususnya melalui globalisasi perbankan.

# Pembiayaan Bhakti Finance capai Rp620 miliar

OLEH M. TAHIR SALEH  
Bisnis Indonesia

JAKARTA: PT Bhakti Finance meraih total penyaluran pembiayaan baru (*booking*) hingga Oktober tahun ini mencapai Rp620 miliar atau naik 226% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, yaitu Rp190 miliar.

Sekretaris Perusahaan Bhakti Finance Yudhananta mengatakan pembiayaan baru itu mencapai 88,5% dari total target *booking* sepanjang tahun ini yang dipatok Rp700 miliar.

Perseroan optimistis *booking* akan mencapai lebih dari Rp700 miliar seiring dengan peningkatan permintaan konsumen dalam 2 bulan ke depan.

"Hingga Oktober 2010, pembiayaan kami sudah *on track*. Kami optimistis dapat melewati target," katanya, kemarin.

Dari total *booking* tersebut, sebesar 48% atau Rp297,6 miliar disumbang oleh pembiayaan mobil yang

kini menjadi kontributor terbesar pembiayaan anak usaha Grup Bhakti Investama itu.

Adapun, pembiayaan motor Jepang menyumbang 29%, motor China 12,55%, dan sewa guna usaha sekitar 9%. Dari pembiayaan mobil, sebesar 90% merupakan pembiayaan mobil bekas.

Selain itu, Bhakti Finance juga masuk ke pembiayaan kredit pemilikan rumah (KPR) dan kredit elektronik.

Adapun, Direktur Operasional Bhakti Finance Hadianjaya sebelumnya mengatakan target internal perseroan sebesar Rp1 triliun atau meningkat 290% dibandingkan dengan realisasi tahun lalu sebesar Rp256 miliar.

Hadianjaya mengungkapkan perseroan membuka 64 jaringan pada tahun ini atau naik dari 42 jaringan pada tahun lalu guna memperluas cakupan bisnis pembiayaan perseroan.

Selanjutnya, Yudhananta mengatakan perseroan kini memperbesar

lini bisnis pembiayaan mobil bekas seiring dengan peta persaingan multifinance saat ini. Periode yang sama tahun lalu, porsi pembiayaan mobil baru mencapai 21% dari total *booking* Bhakti Finance.

"Kami mengubah strategi dari awalnya besar pada pembiayaan motor, kini kami masuk ke pembiayaan mobil bekas dan dominan di mobil komersial," katanya.

Yudhananta mengatakan perseroan akan membeli kembali surat utang yang jatuh tempo pada 3 Desember tahun ini dengan target sebesar Rp55 miliar. Pembelian surat utang itu merupakan yang ketiga kali.

Pada Juli, perseroan *buyback* obligasi sebesar Rp12 miliar dan sebagian disiapkan untuk dijual kembali. Selanjutnya, perseroan juga membeli kembali obligasi sebesar Rp12 miliar pada Agustus 2010.

"Penawaran dari pemegang obligasi ini antara 15 November-16 November dan *settlement* pada 18 November yang diurus oleh PT Bhakti Securities," kata Yudhananta.

Standard Chartered



Dapatkan sebuah bank mempertahankan suatu keyakinan? Dapatkah ia menyeimbangkan ambisi dengan nuraninya? Untuk melakukan apa yang seharusnya. Bukan apa yang dapat dilakukannya. Karena tak semua hal penting yang diperhitungkan dalam hidup, dapat dihitung. Dapatkah ia tak hanya melihat keuntungan yang diperolehnya, tapi juga bagaimana memperolehnya? Dan berdiri sejajar dengan masyarakat, bukan di atas mereka. Dimana setiap solusi diberikan sesuai individunya. Dengan melakukan kebaikan, dapatkah sebuah bank menjadi besar? Di berbagai tempat kami bernaung, tujuan kami tetaplah sama. Hadir di sini untuk semua orang. Di sini untuk kemajuan. Di sini untuk jangka panjang. Di sini untuk selamanya.

Here for good  
standardchartered.com